

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andri Gunawan, Erwin Oemar, dan Refki Saputra, Membatasi Transaksi Tunai (Peluang dan Tantangan), (Jakarta: Tahir Foundation, 2013).

Ariawan G, Suwinto Johan, dan Indah Siti A, Kapita Selekta Hukum Bisnis, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

Asshiddiqie, Jimly, Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005)

Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan), (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2003).

Gunandhie, Kusnu, Harmonisasi Sistem Hukum (Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik), (Surbaya: JP Books, 2006)

Hanitijo Soemitro, Ronny. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991).

Indra Muchlis Adnan, Sofian Hamim, dan Tiar Ramon, Hukum Bisnis, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016).

J Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: C.V. Armico, 1985).

Simanjuntak, Augustinus, Hukum Bisnis (Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis), (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2010).

Sri Mamuji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 2003)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Suparman, Eman, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan, (Jakarta: Tatanusa, 2003)

Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)

Totok Budisantoso dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
13. Peraturan Bank Indonesia 19/9/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.
14. Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
16. Peraturan Bank Indonesia 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran
17. Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
18. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
19. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.
20. Ketentuan Asosiasi Pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/XII/2022 tentang Materi Penyusunan Edukasi untuk Merchant dan Pengguna QRIS.

C. Jurnal

Deni T dan J. Fitriyani, E-Payment System. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008), (Depok: 20-21 Agustus 2008)

Dewan Perwakilan Rakyat, Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Undang-Undang (Jakarta, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017)

Dinabandhu Sethi dan Debasis Acharya, Financial Inclusion and Economic Growth Linkage: Some Cross Country Evidence, (2018).

Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, (2017).

Gabriella J. Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS sebagai Kanal Pembayaran pada Praktik UMKM dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 06, (3 Desember 2021).

Intanie Dewi, Vera, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, Bina Ekonomi, (Agustus 2006).

Ivan Rifqi Anindita, Aminah, dan Budi Ispiyarso, Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia, Jurnal Notarius Vol. 13 No. 2, (2020).

Ladi Wajuba, Tony Seno, dan Prayudi Setiawan, Literasi Keuangan Digital sebagai upaya Pembekalan Kampung Binaan UMKM Go Digital, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, (2 Desember 2021)

Mattalatta, Andi, Politik Hukum Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6, 94 Desember 2018).

Mohammad Aziz, Noor, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Rechtvindings BPHN, Media Pembinaan Hukum Nasional, (Januari-April 2012).

Novita dan Stefany Ayu Krisna P., Animo Nasabah Bank Indonesia dalam Memiliki Kartu Berlogo Gerbang Pemabayaran Nasional, Jurnal Administrasi Kantor, (Jakarta: 20 Desember 2019).

Palmira Permata Bachtiar dan kawan-kawan, Ekonomi Digital untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia, The SMERU Research Institute, (Jakarta: Desember 2020).

Sapto, Setio Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Negara, (2009).

Stefan Ingves, Money and payments – where are we heading?, Sveriges Riksbank, (2018).

D. Internet

Alfarizi, Moh. Khoiry, “Viral Pemalsuan QRIS Kotak Amal, Perhimpunan Remaja Masjid: Usut Tuntas Motifnya”, Tempo.co, 23 April 2023, halaman 1,

<https://bisnis.tempo.co/read/1714115/viral-pemalsuan-qriskotak-amal-perhimpunanremaja-masjid-usut-tuntas-motifnya>

Data Indonesia, Statistik Pengguna QRIS Tahun 2022,
<https://dataindonesia.id/Digital/detail/ada-2875-juta-pengguna-qrisk-di-indonesia-hingga-akhir-2022>

Frenadya, Roy, “Terungkap, Modus We Chat Pay Ilegal & Mafia China di Bali”,
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181128161757-37-44117/terungkap-modus-wechat-pay-ilegal-mafia-china-di-bali>.

Nominal Transaksi Uang Elektronik di Indonesia, <https://www.aspi-indonesia.or.id/berita-info/statistik/>

Nominal transaksi QRIS tahun 2020 hingga pertengahan 2022, <https://www.aspi-indonesia.or.id/berita-info/statistik/>

Rifka Sri Rahayu, Isna, “Mayoritas Digunakan UMKM, Saat Ini Pengguna QRIS Mencapai 23 Juta”, Kompas, 4 Oktober 2022, halaman 1
<https://money.kompas.com/read/2022/10/04/142000726/mayoritas-digunakan-umkm-saat-ini-pengguna-qrisk-mencapai-23-juta> (diakses pada 28 Oktober 2022)

“Statistik Pengguna QRIS Tahun 2022”, Data Indonesia
<https://dataindonesia.id/Digital/detail/ada-2875-juta-pengguna-qrisk-di-indonesia-hingga-akhir-2022> (diakses pada 28 Februari 2023).

E. Brosur/Pamflet

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, Pedoman Penyusunan Naskah
Undang-Undang (Jakarta:2017)

Bank Indonesia, Blue print Sistem Pembayaran 2025 (Jakarta: 2019)

Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
(Jakarta: 2020)